



HUKUM SYAHRIR

20

TAHUN

PENJARA SERTA

RAMPAS

SEMUA ASET

Hukum Syahrir 20 Tahun Penjara Serta Rampas Semua Aset

A. Pendahuluan

Syahrir sebagai penyelenggara negara dan pejabat pemberi izin, sudah tahu Hak Guna Usaha PT Adimulia Agrolestari akan kadaluarsa akhir 2024. PT Adimulia yang sudah kehabisan dana Rp 13,9 miliar sejak 2017 hingga 2021 belum juga dapat kejelasan atas perpanjangan HGU. Sudarso orang kepercayaan perusahaan ditunjuk untuk urus permasalahan ini. Lalu meminta bantuan Risna Virgiyanti dan Teguh Saputra supaya bisa bertemu dengan Syahrir.

4 Agustus baru keduanya berjumpa dan Syahrir meminta Rp 3,5 Miliar. Sudarso konsultasi dengan Frank Wijaya dan disebut ada uang tersedia di brankas kantor Adimulia Kuansing sebanyak SGD 150.000. Uang baru diserahkan 2 September dirumah dinas, waktu itu kedatangan Sudarso sudah dipesankan ke satpam rumah dinas Freddy Hutauruk serta dilarang bawa alat apapun.

Uang diserahkan sebanyak 112.000 SGD dan keesokan harinya langsung ekspos di Hotel Prime Park. Kekhawatiran Sudarso atas pembangunan kebun plasma di kuansing langsung *diback up* Syahrir, tidak perlu dibangun lagi cukup minta rekomendasi dari Bupati Kuansing. Atas ide penyelesaian masalah tanpa ada dasarnya inilah Andi Putra juga meminta uang ke Adimulia sebanyak Rp 1,5 miliar baru diserahkan Rp 500 juta. Sampai akhirnya terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama Sudarso.

Selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN di Maluku Utara, menerima permohonan HGB dari PT PLN, PT Jababeka Morotati dan PT Industrial Wedebay Industrial Park, PT Teka Mining Resources. Menerima Rp 76,8 Juta dari pegawai pertanahan di BPN Maluku Utara. Serta penerima lainnya sebanyak Rp 4,9 miliar masuk ke rekening Syahrir, Eva Rusnati dan Yuli Sasmita.

Ketika menjabat Kakanwil BPN Riau menerima uang dari Notaris/PPAT, perusahaan yang sedang mengajukan perpanjangan HGU dan dari pegawai pertanahan, menerima sebanyak Rp 1,17 miliar. Uang ini bersumber dari ; Risna Virgiyanti, PT Peputra Suprayaja, PT Sekarbumi Alam Lestari, PT Eka Dura Indonesia, Siska Indriyani, PT Safari Riau, First Resources Grup (PT Riau Agung Karya Abadi, PT Perdana Inti Sawit Perkasa, PT Surya Intisari Raya, PT Meridan Sejati Surya Plantation).

Lalu penerimaan lainnya sebanyak Rp 8,2 miliar berkaitan dengan jabatannya, masuk ke rekening Eva Rusnati, Yuli Sasmita, Mila, Okta, Yudi, Rendy dan Hifson.

Ditambah gratifikasi berbentuk mata uang asing sebanyak SGD 557.000 setara Rp 5,9 miliar.

Penerimaan tersebut langsung Syahrir belikan menjadi 9 bidang tanah dan 5 kendaraan.

Maka total uang yang diterima Syahrir selama menjabat di Maluku Utara dan Riau sejak 2017 hingga 2022 adalah sebanyak Rp Rp21.130.375.401

Senin lalu, 7 Agustus Syahrir dijatuhkan tuntutan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi penjara 11 tahun 6 bulan penjara, melakukan pembayaran uang pengganti sebesar 21,1 Miliar *plus* SGD 112.000. Dan harta yang didapat dari hasil tindak pidana disita dan dirampas oleh negara.

Bagaimana isi detail dari persidangan selama 22 kali yang menghadirkan 94 saksi dan 1 ahli, berikut lengkapnya.

Data Diri Terdakwa :

Nama : Muhammad Syahrir
Tempat : Metro Lampung
Umur : 60 tahun
Tanggal lahir : 28 Agustus 1962
Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Tinggal : Jl Tanjung Harapan Pepetak I No 18 RT 25/RW 5 Kelurahan Bukit Sangkal, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : Strata Dua

Majelis Hakim,

Salomo Ginting, Yuli Artha Pujayotama, Yelmi

Penuntut Umum

Rio Frandy, Dwi Eko Raharjo, Sandy Septi Murhanta, Tira Agustina

Penasihat Hukum

Muhajirin, Mohd hasnul Adrian, Syahidila Yuri, Didit Bayu Prasetyo, Retno Dinovita, Muhamad Taufik

B. Kesaksian

No	Nama	Pekerjaan	Kesaksian
1	Umar Fathoni	Kabid PHPT Kanwil BPN Riau	Tidak mengakui dapat uang dari PT Adimulia lewat Sudarso
2	Dwi Handaka Purnama	Kabid Suvei dan Pendataan Tanah kanwil BPN Riau	Ketika membawa berkas PT Adimulia Agrolestari ke Jakarta, semua keperluannya dibayai Sudarso. Dan kepeluan survei lapangan perusahaan yang tanggung
3	Sutrilwan	Kepala Tata Usaha Kanwil BPN Riau	Syahrir kerap meminta uang tiket pada anak buahnya bila hendak berangkat ke luar kota. Permintaan itu disampaikan lewat ajudannya, Muhammad Teguh Saputra. Tidak hanya itu, pegawai di Kanwil BPN hingga kantor pertanahan juga mesti mengumpulkan uang jika ada tamu datang kementerian yang datang untuk menanggung biaya akomodasi dan konsumsi.
4	Yeni Veranika	Analisis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Riau	Menerima uang dari Sudarso Rp 40 juta rupiah buat bayar sewa hotel. Sisanya digunakan untuk keperluan pribadi dan bagi-bagi ke rekan-rekan sekantor.
5	Indrie Kartika Dewi	Analisis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Riau	Terima uang dari Yeni yang diberikan Sudarso sebab ia menjadi panitia saat ekspos HGU PT Adimulia Agrolestari
6	Siddik Aulia	Analisis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Riau	Terima uang dari Yeni yang diberikan Sudarso sebab ia menjadi panitia saat ekspos HGU PT Adimulia Agrolestari Link : https://senarai.or.id/korupsi/mantan-kakanwil-bpn-riau-muhammad-syahrir-didakwa-terima-hadiah-atau-janji-gratifikasi-hingga-pencucian-uang/ video: https://youtu.be/oOO6jruGeBM

7	Sudarso	General Manajer PT Adimulia Agroletari	Ia berjumpa dengan Syahrir atas bantuan Risna Febriyanti, bahas soal tumpang tidih lahan dan minta dibantu perpanjangan HGU sebab pengurusan sudah sejak 2017. Syahrir serahkan sticky notes, minta Rp 3,5 miliar bentuk dollar singapura. Lalu diserahkan 2 September 2021 sebanyak 112.000 SGD. Keesokan hari langsung ekspos. Sisanya akan diberi setelah surat pengantar Kakanwil ke Kementerian ATR/BPN terbit.
8	Frank Wijaya	Komisaris PT Adimulia Agrolestari	Ia setuju permintaan dollar singapura sebab di brankas perusahaan ada 150.000 SGD yang sudah lama disimpan mendiang Hadi Ngadiman.
9	Rudi Ngadiman	Adik Hadi Ngadiman	Ia yang bawa uang 150.000 SGD dari Kuansing ke Pekanbaru untuk diserahkan ke Sudarso. Pecahan 1000 dalam amplop kuning
10	Syahlevi Andra	Kepala Kantor PT Adimulia Agrolestari di Pekanbaru	Ia terima uang dari Rudi Ngadiman setelahnya serahkan ke Sudarso dibelakang kantor gubernur Riau.
11	Risna Virgiyanti	Mantan Kepala Kantah Kuansing	Ia yang bantu ketemuan Sudarso dengan Syahrir. Terima Rp 14 juta dari Sudarso dan juga dari perusahaan lain. Pernah disuruh bayar kursi rumah Syahrir yang sudah dipesan di furniture dan bayar tiket pesawat untuk ke Kementerian ATR/BPN
12	Muhammad Teguh	Ajudan Syahrir	Sering bantu fasilitasi perusahaan untuk bisa jumpa dengan Syahrir, lalu sering diberi uang dar mereka. Ketika ekspos PT Adimulia ia terima Rp 4 juta lewat Indrie. Ia juga yang disuruh Syahrir untuk carikan bawahan untuk bayar tiket pesawat dan bayar akoodasi serta konsumsi jika ada tamu dari kementerian ATR/BPN
13	Eri Suwondo	Kakanwil BPN Kalbar	Dulu pernah jadi Kepala Kantah Kuansing, ia sering komunikasi dengan Sudarso. Kini saat di Kalbar, Sudarso konsultasi ke dirinya terkait uang permintaan Syahrir jelang waktu pensiunnya.
14	Fredi Hutauruk dan Joni Ikram	Satpam Rumah Dinas Syahrir	Beberapa kali lihat Sudarso datang ke rumah dinas, datang sendirian dan

			bersama Risna Febriyanti. Dan pernah dipesan Syahrir akan ada pihak PT yang akan masuk kerumah. Diminta agar jangan bawa alat apapun. Link: https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-sering-jumpa-perusahaan-urusan-hgu/ Video: https://youtu.be/rOoDX1rkz84
15	Fahmi Zulfadli	Legal PT Adimulia Agolestari	Sejak 2017 buat pengurusan perpanjangan HGU, lalu 2021 masukkan lagi langsung ke Kakanwil BPN Riau sebab HGU akan kadaluarsa Desember 2024. Ia yang selalu komunikasi terkait kekurangan bekas dengan pegawai Kanwil. Salah satu kekurangan belum adanya plasma perusahaan di Kuansing.
16	Sunyeto	Kades Bumi Mulya	Setuju dengan perpanjangan asal plasma tetap dibangun di Kuansing. Ia terima dari PT Adimulia Rp 2,5 juta
17	Abdul Rohmat	Ketua BPD Desa Beringin Jaya	Desa Beringin Jaya menolak perpanjangan HGU sebab lahan transmigrasi warga dicaplok masuk HGU seluas 600 hektar
18	Riana Iskandar	Direktur Pembukuan dan Pajak PT AA	Dibuku trasaksi perusahaan selain pembayaran sah perpanjangan HGU untuk negara ada juga yang dikeluarkan uang untuk “pinjaman” Andi Putra Bupati Kuansing.
19	Nugraha Faturazi	Ajudan Syahrir	Ia pernah damping Syahrir terima kunjungan dari Mantan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra untuk cek lokasi tol Bangkinang-Padang dan ke Kepulauan Meranti. Ia pernah temani Syafrizal Wahab tukar uang dollar ke Money Changer.
20	Safrizal Wahab	Petugas kebersihan Kanwi BPN Riau	Ia sering disuruh Syahrir tukar uang dollar Money Chnger Kirana. Lalu uang dimasukkan ke rekening Syahrir, Mila, Hibson, Eva Rusnati dan Yudi. Lalu uang tunai disuruh transfer ke rekening Adi Fimansyah, Agasi, Ferdiansyah dan Lusiana. Setelah pemeriksaan KPK, dimarahi Syahrir karena berikan keterangan jujur.

22	Syafri	Staff bidang Pendaftaran dan Pemetaan Kanwil BPN Riau	<p>Ia pernah lihat Sudarso dan Sutrilwan bicarakan terkait pemecahan sertifikat HGU PT Adimulia Agrolestari</p> <p>Link: https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-simpan-uang-di-rekening-orang-lain/</p> <p>Video: https://youtu.be/loJDMakoyjY</p>
23	Suhartono	Direktur PT Murini Wood Indah Resources	<p>Ia bantu pengurusan perusahaan satu grup Surya Dumai yakni PT Riau Agung Karya Abadi di Kampar seluas 3.293,6 hektar.</p> <p>Sering berikan sesuatu dari perusahaan untuk kantor pertanahan yakni bayar 10 hari sewa mobil Fortuner VRZ untuk Syahrir pulang kampung ke Palembang senilai Rp 15 Juta. Sapi kurban untuk Kanwil BPN Riau sejak 2020 hingga 2022 sebesar Rp 54 juta. sumbangan untuk Hari Agraria dan Tata Ruang sebanyak Rp 30 diberi lewat Umar Fathoni Kabid I. Pembelian 5 laptop dan 2 printer di Kanwil BPN Riau untuk kantah Dumai bernilai 70 juta dan beli lemari Rp 7 juta untuk Kabid II BPN Riau.</p>
24	Ahmad Fahmi	Legal PT Eka Dura Indonesia	<p>Untuk perpanjangan HGU perusahaan diberilah uang Rp 1 Miliar dari tawwr menawar Rp 5 miliar. Uang dimasukkan dalam koper lalu diantar ke rumah dinas Syahrir. Keesokan harinya perusahaan langsung ekspos.</p>
25	Indra Gunawan	Manajer PT Adei Plantation dan Indutry	<p>Ia bantu urus HGU baru anak perusahaan yakni PT Safari Riau. Ia berikan Rp 10 juta ke Syahrir lewat bawahannya.</p>
26	Jusman Bahudin	Presiden Direktur PT Sekar Bumi Alam Lestari	<p>Kepadanya Syahrir sering minta uang dan tiket pesawat, dan selalu diberikan ke rumah dinas. Memang PT SBAL sedang mengajukan perpanjangan HGU</p>
27	Satimin	Direktur PT Peputra Maha Raya	<p>Perusahaan sedang urus izin pemanfaatan tanah terlantar seluas 92 hektar. Ia berikan Rp 20 juta ke Syahrir dan Syafriani Rp 10 juta.</p>
28	Siska Indriyani	Notaris Kampar	<p>Ia pernah konsultasi ke Syahrir atas pekerjaannya di Kanwil BPN Riau yang</p>

			belum selesai selama enam tahun. Setelah itu Syahrir lewat M Teguh minta dibayarkan tiket pesawat sejumlah Rp 37 juta tapi di bayar Rp 30 juta.
29	Mila Septiani	Keponakan Syahrir	<p>Dia dititipkan kerja di Kantah Pekanbaru. pernah dipanggil ke Kanwil BPN Riau untuk dibuatkan buku rekening BNI, tapi dikuasi Syahrir. Lalu setor tunai uang ratusan juta ke rekening itu, uang diserahkan Syahrir.</p> <p>Dan sering menerima koper dari perusahaan di rumah dinas, untuk diserahkan ke Syahrir.</p> <p>Link :</p> <p>https://senarai.or.id/korupsi/saksi-kode-syahrir-main-mainlah-ke-pondok/</p> <p>video : https://youtu.be/LIJgLQPGpjs</p>
30	Okta Maya Sari	ART Ruah Dinas Syahrir	la disuruh bukan buku rekening di BNI, lalu semuanya dikuasai Syahrir. Dan sering setor tunai uang ke rekening itu atas perintah Syahrir.
31	Yudi Ariadi	Keponakan Syahrir	la dipekerjakan di Kabid IV BPN Riau. Dibukakan rekening juga di BNI. Sering menyetor tunai uang ratusan ke rekening itu, lalu mentransfer ke rekening Eva Rusnati yakni Istri Syahrir.
32	Yolanda Dita Aptri	Pemasaran BNI Sudirman Pekanbaru	la turuti permintaan Syahrir untuk bukakan rekening, sebab bank sedang jalin kerjasama penyaluran gaji pegawai pertanahan.
33	Abdul Gani	Supir Syahrir	Sering antar Syahrir ke bank BRI, BNI, Mandiri dan Maybank. Pernah juga lihat Syahrir ketemu dikantor dengan Dedi Handoko
34	Julia Dwi Cantika	Keponakan Syahrir	<p>la sering menerima koper dari perusahaan untuk Syahrir di rumah dinas tai tidak tahu nama perusahaannya</p> <p>Link :</p> <p>https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-</p>

			sembunyikan-uang-pakai-nama-kerabat/ Video : https://youtu.be/OY95YST69kg
35	Charistina Lim	Teller Mandiri Prioritas Sudirman Pekanbaru	28 Juni 2022, ia yang melayani pencairan deposito Syahrir sejumlah Rp 2 miliar. Saat itu uang pencairan dipegang oleh Muhammad Harris
36	Muhammad Harris atau Harris Kampai	Wiraswasta	Uang deposito tadi Syahrir minta Harris yang ubah menjadi dollar singapura. Keduanya kenal sebab ada lahan harris yang terkena jalan tol, lalu keduanya bertemu terkait ganti rugi
37	Andrising Husin	Pemilik Money Changer Kirana Pekanbaru	Dua kali didatangi Harris untuk minta dibuatkan kuitansi kosong tanpa penjualan dolar singapura, tapi ditolak.
38	Issanova Winny Damora	Kasub Hukum dan Aset PTPN 5	Sewaktu pengurusan HGU PTPN 5 wilayah Indragiri Hulu, semua biaya keperluan pegawai BPN untuk sidang lapangan dibebankan ke perusahaan. Dari permintaan perpanjangan 7.600 hektar hanya 1.627 yang diverifikasi sebab lainnya masuk dalam kawasan hutan.
39	Edy Johan	Dirut PT Sewangi Sejati Luhur	Untuk pengurusan HGU mereka sudah kehabisan dana Rp 1,7 miliar itu setoran ke negara dan biaya untuk pegawai BPN. Perpanjangan masih tersendat di BPN Pusat.
40	Kandar	HRD PT Sumber Jaya Indah Nusa Coy	Perusahaan sudah kehabisan uang miliaran untuk fasilitasi kebutuhan pegawai BPN untuk tinjauan lapangan 8.200 hektar, cek HGU ke Jakarta dan ajak Syahrir untuk jadi fasilitator penyelesaian konflik dengan masyarakat Link : https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-menukarkan-kekayaannya-jadi-mata-uang-asing/ Video: https://youtu.be/iQl3QXvf7bE
41	Hifson	Adik Ipar Syahrir	Ia dipekerjakan di BPN Riau dan pernah disuruh buka rekening BRI tapi dalam penguasaan Syahrir. Jika ada butuh setoran tunai ia dipanggil ke uang kerja, lalu uang ratusan juta disetor kedalam.

42	Rendi Noveliandri	Keponakan Syahrir	la diperkerjakan di Kantah Kampar. Ia disuruh bukakan rekening BNI di Bangkinang. Isi rekening itu diisi uang milik Syahrir dan setran tunai untuk dimasukkan ke dalam juga dari Syahrir. Rekening akan diserahkan jika Syahrir pulang kampung ke Palembang.
43	Muhammad Alim Hidayatullah	Ajudan Syahrir	Selama empat bulan damping Syahrir, ia sering disuruh Syahrir transfer uang ke rekening Tia Widiansyah anak Syahrir dan Eva Rusnati di Bank Mandiri dan Panin.
44	Fero Bayunanda	Relationship Manajer Mandiri Prioritas Pekanbaru	Syahrir punya empat rekening mandiri dan deposito sebanyak Rp 2,4 miliar. Sumber uang berasal dari pegawai BPN Maluku Utara dan kirim ke rekening Syahrir, kedua istrinya, biaya pernikahan anak dan pembelian tanah di Palembang. Link : https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-akui-sebagian-uangnya-berasal-dari-pemberian-orang/ video : https://youtu.be/2dzsNohc_UQ
45	Firdaus Fibry	Pengusaha catering Palembang	la jual tanah ke Syahrir seluas 588 meter dengan harga Rp 300 juta dihadapan Notaris Eddy Rosman. Namun di Akta Jual beli hanya dicantumkan transaksi sebanyak Rp 200 juta, diatasnamakan Amrullah Menantu Syahrir .
46	Tomil Fajri	Keponakan Syahrir	la yang bantu hubungkan penjualan tanah antara Firdaus dan Tomil. la tahu jual beli sepakat diangka Rp 250 juta dan ia dapat fee Rp 10 juta. Usaha pamannya ini hanya sawah dan rumah kontrakan
47	Tsuny Ulfia Nafisa	Costumer Service Mandiri Gedung Indo Rama Kuningan, Jaksel	la terima penukaran dollar amerika Syahrir sebanyak 6.700 menjadi rupiah. Jadilah uangnya Rp 93,8 juta; Rp 53,8 juta dimasukkan ke rekenng mandiri Syahrir lalu sisanya diambil tunai
48	Elisabet Fu	Transaction Manajer Panin Bank Palembang	Syahrir punya dua rekening di bank ini, dengan total transaksi Rp 897 juta

			<p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-usaha-syahrir-hanya-sawah-dan-kontrakan/</p> <p>Video : https://youtu.be/yQRHoSoZotc</p>
49	Gofur Buroyo	Supir Kakanwil BPN Maluku Utara	Selama jadi supir Syahrir, ia kerap disuruh transfer ke rekening kedua istri Syahrir.
50	Muhammad Rizal Madjid	Ajudan Syahrir di BPN Maluku Utara	Ia juga disuruh transfer ke rekening kedua istri Syahrir dan anaknya Tia Widiansyah
51	Muhamamd Faisal	Pegawai BPN Maluku Utara	Kalau ingin setor ke rekening istri Syahrir, biasanya sudah ada catatan kecil isi nomor tujuan pengiriman dan jumlah uang dalam amplop putih
52	Muhammad Abdu Melawat	Pegawai BPN Maluku Utara	Ia kirim uang ke rekening Syahrir dan Eva Rusnati tertotal Rp 289 juta
53	Meldy Yohanes	Satpam BPN Maluku Utara	Ia pernah disuruh transfer uang Syahrir ke rekening Tia Widiansyah dan Eva Rusnati
54	Kritina Ledi Romauli Simangusong	Costumer Service Maybank Palembang	<p>Didalam rekening ini ada sebanyak Rp 1,2 miliar transaksi yang dilakukan Syahrir</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/saksi-syahrir-tidak-punya-usaha-apapun-di-maluku-utara/</p> <p>Video: https://youtu.be/VljbP2Eevm4</p>
55	Muhamad Risa Chakam	Bendahara BPN Maluku Utara	Semasa menjadi Kakanwil di Maluku Utara pendapatan Syahrir sebanyak Rp 540 juta
56	Adinda Setianingrum	Sekretaris Pribadi Syahrir di BPN Maluku Utara	Ia beberapa kali transfer uang ke rekening Syahrir dan Eva Rusnati. Dan menerima transferan dan pembayaran tiket penerbangan Syahrir. Sering ia yang minta langsung agar pegawai kantah untuk transfer uang, atas suruhan Syahrir.
57	Muhammad Sabri Sabam	Kasi PHPT Kantah Halmahera	Diminta Syahrir uang Rp 25 juta

		Selatan	
58	Tentrem Prihatin	Kabid Hukum Pertanahan BPN Maluku Utara	Bayar tiket pesawat Syahrir ke Palembang Rp 50 juta
59	Indra Gunawan	Kasi Survei dan Pemetaan Kantah Halmahera Timur	Kirim uang ke Eva Rusnati Rp 67 juta perintah Syahrir
60	Amenius Pao	Kasi Survei dan Pemetaan Kantah Halmahera Utara	Kirim uang ke rekening Adinda perintah Syahrir untuk bayar tiket pesawat ke Palembang
61	Ery Kurniawan	Manajer Sustainable PT Indonesia Wedebay Industrial Park	Perusahaan sudah habiskan Rp 422 juta untuk pembuatan Hak Guna Bangunan perusahaan di Kanwil BPN Maluku Utara Link : https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-suka-minta-uang-anak-buah/ Video : https://youtu.be/gxj1Zs3ry6o
62	Aldi Hamka	Pegawai BPN Maluku Utara	Ia disuruh Syahrir transfer uang ke rekening Priyanka Rizaldi sebanyak Rp 20 juta
63	Rio Kurniawan	Kasi PHPT BPN Maluku Utara	Ia juga pernah transfer uang ke rekening Eva Rusnati. Serta menemani Syahrir jumpa dengan pihak perusahaan yang sedang urus perizinan pertanahan.
64	Arizalni Mahri	Swasta	Ia jual tanah mliknya seluas 16x40 meter ke Syahrir seharga Rp 1 Miliar, dibayar pakai rupiah dan dollar amerika. Akta dibuat dihadapan Notaris Edhy Rosman
65	Eddy Rosman	Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah	Ia buat dua akta jua beli untuk tanah milik Arizalni Mahri dan Firdaus Fibry. Link : https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-sering-melakukan-pertemuan-dengan-perusahaan/ Video : https://youtu.be/h6ojM15mhAQ
66	Mustar	Pedagang	Ia jua ruko miliknya ke Syahrir seharga Rp 850 juta, di AJB diatasnamakan Agasi Arliansyah

67	Alexson	Adik ipar Syahrir	Jual dua bidang tanahnya ke Syahrir seharga Rp 650 juta, diatasnamakan ke Agasi dihadapan Notaris Angga Mahaditama
68	Mawarna Zulbahri	Teman kuliah Syahrir di Univ Tritinanti Palembang	Jual dua bidang tanahnya ke Syahrir seharga Rp 1,7 miliar, pembayaran dengan dollar singapur dan rupiah. AJB diatasnamakan Agasi lalu diubah ke Herman.
69	Soleha Arliani	Investigator BRI	Di BRI Syahrir punya empat rekening dengan transaksi satu miliar lebih Link : https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-pakai-nama-anak-untuk-kepemilikan-tanah/ Video: https://youtu.be/5nPWx9JlzPs
70	Alfan	Kepala Cabang Clifan Finance Palembang	Disana Syahrir ajukan kredit mobil Brio seharga Rp170 juta diatasmanakan ke Muhamad Isa untuk hindari pajak progresif
71	Hadi Maryanto	Kepala Cabang PT Tunas Auto Graha Palembang	Beli mobil Aplhard dengan bayar 110.000 SGD diatasnakaman Adi Fimansyah
72	Bustam Mursin	Pemilik Bustom Showroom	Beli mobil Toyota ST 86 seharga Rp 467 juta
73	Risnawaty Rahman	Staff Money Changer La Tunrung	Keluarga Syahrir, istri dan anaknya Verdiansyah, Indah Ismiansyah, Adi Frmansyah, Agasi sering tukarkan dollar singapura minimal SGD 50.000
74	Herman	Adik Ipar Syahrir	Pernah diberikan pinjaman Rp 500 juta dari Syahrir. Dan pembatalan AJB dari Mawarna Zulbahri dipindahkan ke namanya, tapi dia tidak pernah bayar sepeserpun. Link : https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-kerap-transaksi-dengan-mata-uang-asing/ video : https://youtu.be/PZctZeRwFqE
75	Yosepin Susanto	Staff legal PT	Di bank ini Eva Rusnati punya rekening

		Bank Central Asia	totalnya Rp 1,5 miliar, bersumber dari bawahan yang disuruh Syahrir kirim uang kesana.
76	Akhmad Adriansyah	Costumer Service PT Bank Negara Indonesia cabang Kayu Agung, Sumsel	Di bank ini Syahrir punya tiga rekening. Selama di Maluku Utara terhimpun uang sebanyak Rp 1,65 Miliar dan di Riau Rp 1,9 miliar. Lalu rekening Eva Rusnati ada uang masuk sebanyak Rp 459 juta. Semua transaksi berasal dari bawahan Syahrir.
77	Kemas Abdullah	Notaris/PPAT Palembang	Ia bantu jual beli antara Sulbahri Madjir dengan Syahrir seharga Rp 400 juta. Tidak terima uang jasa dari transaksi itu.
78	Muhammad Doni Dachroni	Notaris/PPAT Ogan Komering Ilir	Ia bantu jual beli antara HUsni Ismail dan Yuli Sasmita, istri kedua Syahrir seharga Rp 80 juta, tanpa imbalan apapun.
79	Angga Mahaditama	Notaris/PPAT Ogan Komering Ulu Timur	Ia bantu transaksi antara Alexson dengan agasi seharga Rp 65 juta dengan imbalan jasa Rp 1 juta. Selebihnya ia tidak pernah dibayar yakni jual tanah antara Lina Lesatari dengan Syahrir tanah 799 meter seharga Rp 10 juta.
80	Lina Lestari	Notaris/PPAT OKU Timur	Jual tanah ke Syahrir seluas 799 meter seharga Rp 105 juta. Dan bantu buat AJB antara Abdul Salam dengan Syahrir tanah seluas 810 meter seharga Rp 30 juta, ia terima imbalan jasa Rp 1 juta.
81	Agusta Rizani	Notaris/PPAT Palembang	Pernah bantu transaksi penjualan tanah antara Mustard dan Syahrir, ternyata setelah diverifikasi nilainya RRp 890 juta tapi transaksi Rp 475 juta dan AJB tersebut belum terregister. Lalu bantu untuk transaksi Elawati dengan Syahrir atas tanah 334 meter, ia langsung patok imbalan jasa Rp 10 juta.
82	Dewi Murni	Pengelola Sawah Syahrir	Ia kelola sawah keluarga Syahrir seluas 9 hektar, 3 hektar sudah milik Syahrir. Penghasilan dalam setahun hanya Rp 360 juta. Dan kebun karet Syahrir hanya 2 hektar.
83	AR Khomeini	Staff Maybank Finance Palembang	Disana Syahrir kredit pembelian mobil : Mazda 2, fortuner, terios, xenia untuk Yuli Sasmita dan Isuzu MU-X diatasnamakan ke Megawati
84	Risal Nasir	Sekuriti BPN Maluku Utara	Pernah disuruh Syahrir transfer uang Rp 40 juta ke rekening Eva Rusnati

			<p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/cara-syahrir-menghindari-pajak/</p> <p>Video : https://youtu.be/xQTWuT5xeyM</p>
85	Verdiansyah (anak pertama), Indah Ismiansyah (anak kedua), Hadi Firmansyah (anak ketiga), Isro Agasi Arliansyah (anak kelima), Eva Rusnati (istri pertama), Deni Marzuki (menantu), Yuli Sasmita (istri kedua).	Keluarga Syahrir	Menolak bersaksi. Membenarkan isi BAP
86	Luvita Buana Putri	Pegawai LHKPN	Syahrir terakhir lapor harta kekayaan di 2021. Masih ada kekayaannya yang belum dilaporkan termasuk kekayaan yang di atasnamakan ke nama orang lain
87	Nicky Aldi Perkasa	Mitra Kerja PT Pulau Kundur Perkasa	<p>Untuk pengurusan HGU perusahaan di Kanwil BPN Riau telah menghabiskan Rp 2,5 miliar.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/yuli-sasmita-menolak-bersaksi/</p> <p>Video : https://youtu.be/HCgmqlJimo</p>
88	Syahrir	Terdakwa	Syahrir punya pemasukan bersumber dari ketika ia bekerja di BPN, usaha pertanian, minta setoran dari pegawai serta calo tanah dan ucapan terima kasih dari perusahaan dan perorangan

			<p>yang dibantu cari solusi pertanahan.</p> <p>Selama menjabat di Maluku Utara terima sejak septeber 2017 hingga Agustus 2019 totalnya Rp 735 juta, dari sumber gaji, honor dan perjalanan dinas.</p> <p>Dan selama menjabat Kanwil BPN Riau punya pemasukan sejak agustus 2019 hingga September 2022 total Rp 1,6 Miliar.</p> <p>Membagi kekayaan atas nama anak dan istri</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/syahrir-ingat-uang-lupa-asalnya/</p> <p>Video : https://youtu.be/n6wWPBBozT8</p>
89	Yunus Husein	Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang	<p>Dalam pembuktian perkara pencucian uang, Terdakwa lah yang aktif membuktikan harta yang diperoleh merupakan hasil yang sah, dengan pembuktian yang jelas. Jika tidak bisa dibuktikan maka berlaku tujuan dari UU TPPU yakni perampasan aset.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/korupsi/harta-kekayaan-syahrir-bercampur/</p> <p>Video : https://youtu.be/aaleHACC_i4</p>

C. Cluster Saksi dan Ahli

Aparatur Sipil Negara di Maluku Utara dan Riau

Saksi yang dihadirkan penuntut umum; Umar Fathoni, Dwi Handaka Purnama, Sutrilwan, Yeni Veranika, Indri Kartika Dewi, Siddik Aulia, Risna Virgiyanti, M Teguh, Eri Suwondo, Fredi Hutauruk, Joni Ikram, Nugraha Fathurozi, Syafri, Sayafrizal Wahab, M Alim, M Abdu, Gofur buroyo, M Rizal, M Faisal, Meldy Yohanes, M Risa Chakam, Adinda, M Sabri Sabam, Tentrem prihatin, Indra Gunawan, Armenius Pao, Aldi Hamka, Rio Kurniawan. 28 orang anak buah

yang bekerja di BPN Maluku Utara dan Riau. Untuk jabatan kepala bidang dan seksi di BPN dimintai uang, bayar konsumsi tamu kementerian dan membayar tiket pesawat pulang-pergi ke Palembang.

Untuk jabatan pegawai teknis diminta diberi peran untuk sebagai penghubung untuk meminta uangnya dan penampung sementara uang yang telah dikirim. Dan disuruh untuk mengirim uang secara tunai, transfer ke rekening Syahrir dan istrinya atau menukarnya ke mata uang asing.

Para kepala bidang, seksi dan pegawai teknis tidak berani menolak apalagi menanyakan asal usul uang tersebut.

Pengurus perusahaan

Para pengurus perusahaan yang dipanggil penuntut umum; Sudarso, Frank wijaya, Fahmi Zulfadli, Suhartono, Ahmad Fahmi, Indra Gunawan, Jusman Bahudin, Satimin, Issanova Winny, Edy Johan, Kandar, Ery Kurniawan, Nicky Aldi Perkasa. 13 orang ini selama proses pengajuan hak atas tanah biasanya berusaha untuk bisa berjumpa dengan Syahrir melalui ajudan Muhamad Teguh, dengan alasan konsultasi. Jika Syahrir mau, pasti ia sudah tahu apa permasalahan perusahaan, jika sudah begitu ia langsung sebut nominal uang yang diminta. Jika tidak dituruti pengurusan tidak akan ditanggapi seperti PT Eka Dura Indonesia yang serahkan Rp 1 miliar karena sedang berkonflik dengan masyarakat Rokan Hulu. Awalnya Syahrir minta Rp 5 miliar.

Perusahaan yang dimudahkan untuk melaksanakan ekspos dan diterbitkan pengajuan hak atas tanah ke BPN Pusat biasanya menemui Syahrir lagi untuk diberikan uang. Atau mengantar parcel, baju batik dan map yang isinya ada uang ke rumah dinas.

Uang juga mengalir ke bawahan Syahrir. Pegawai yang bantu pelaksanaan ekspos, survei dan pengukuran objek permohonan, konsultasi ke Kementerian ATR/BPN menerima uang dari perusahaan. Dengan alasan hal ini dengan alasan “biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan ke wajib bayar” bunyi Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agraria dan tata ruang /badan pertanahan nasional.

Penggunaan uang tidak pernah dipertanggung jawabkan dan masuk dalam rekening pribadi.

Kerabat keluarga

Eva Rusnati, Yuli Sasmita, Isro Agasi, Arliansyah, Marzuki, Verdiansyah, Indah Ismiansyah, Hadi Fimansyah, Hifson, Rendi, Yudi, Julia, Okta, Mila Septiani,

Dewi Murni, Alexson serta Tomil Fajri. Tujuh nama pertama sepakat menolak memberikan kesaksian alasan keluarga. Mereka mengakui isi pemeriksaan penyidik, kalau mereka penikmat hasil uang yang dikumpulkan Syahrir. Dan nama mereka dipakai untuk bukti kepemilikan harta kekayaan yang sudah dibeli.

Enam orang selanjutnya keponakan dan adik ipar yang bekerja dikantor pertanahan dimanfaatkan data dirinya untuk bukakan rekening. Dalam rekening tersebut isinya uang Syahrir semua dan atas kendalinya juga.

Tiga nama terakhir, mereka yang diminta Syahrir untuk mengurus kebun warisan keluarga dan bantu hubungkan dengan penjual tanah.

Pegawai Bank

Charistina Lim, Fero Bayunanda, Tsuny Ulfia, Kristina Ledi, Soleha Arliani, Akhmad Arliansyah, Yosepin Susanto, Ahmad Adriansyah. Delapan orang ini memaparkan transaksi uang yang tercatat dalam rekening milik Syahrir, istri, anak dan keluarga yang ia suruh buka rekening dan dalam penguasaan Syahrir terdapat ratusan transaksi yang terjadi. Dilakukan dalam waktu berdekatan.

Dan Yolanda Dwi Aptari pegawai bank BNI yang membukakan rekening untuk keponakan, pembantu dan adik iparnya atas perintah Syahrir. Rekening yang dipakai untuk sembunyikan dan tempatkan uang hasil tindak pidana.

Notaris/PPAT

Agusta Rizani, Angga Mahaditama, M Doni, Kemas Abdullah, Eddy Rosman, Siska Indriyani, Lina Lestari. 7 orang ini membantu Syahrir dalam pembuatan Akta Jual Beli dan pembuatan Sertifikat Hak Milik, namun tidak diberi nominal jual beli yang sebenarnya. Jasa mereka pun jarang diberi, hanya mengiklaskan Karena Syahrir dan penghubungnya sama sama petugas pertanahan. Ini untuk mengurangi pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Perusahaan Kredit

Alfan, Hadi Maryanto, Ar Khomeini, Bustam Musin. Keempat rang ini menerima kredit dari siapapun selagi mampu membayar angsuran. Jikapun transaksi ditasnamakan orang lain tetap dilayani selagi masih dalam rumpun keluarga, hal itu tidak masalah. Kalau pembeli melakukan transaksi dengan nama orang lain adalah usaha untuk hindari pajak progresif.

Penjual Tanah dan Bangunan

Lina Lestari, Mawarna Zulbahri, Arizalni, Mustar. Keempat orang ini menjual tanah dan bangunan ke Syahrir. Pembayaran menggunakan rupiah dan dollar

singapura. Ketika penandatanganan akta jual beli menggunakan Isro Agasi anak Syahrir nama yang dihadapkan depan notaris.

Ahli Pencucian Uang

Yunus Husein jelaskan harta hasil pidana yang disembunyikan, dipindah tempatkan, usaha menutup-nutupi, melakukan transaksi dengan mata uang asing dan usaha lainnya sehingga menyulitkan pelacakan itu termasuk perbuatan pencucian uang. Apalagi mencampur dengan harta hasil yang sah, itu juga perbuatan yang sama. Maka dalam perkara ini terdakwalah yang harus aktif menjelaskan asal-usul dan pembuktian harta didapatkan bukan dari perbuatan pidana, jika tidak maka harta tersebut harus dirampas.

D. Dakwaan

Kesatu Pertama

Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 18

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. pencabutan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut.
3. dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan

Atau

Kedua

Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paing singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padaha diketahui atau atut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadah atau janji tersebut adanya hubungan dengan jabatannya.

Dan

Kedua

Pasal 12 huruf B Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP

Pasal 12 B

(1) *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang*

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 65 ayat 1 KUHP

dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana

Dan Ketiga

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

E. Temuan dan Analisis

Korporasi Suap Syahrir

Selama menjabat sebagai sebagai Kepala BPN Maluku Utara ia terima pengajuan Hak Guna Bangunan dari tiga perusahaan tambang; PT Jababeka Mortai, PT Industrial Wedebay Industrial Park, PT Teka Mining Resources

terletak di Morotai Selatan dan Halmahera Tengah. Dan Perusahaan Listrik Negara di Tidore Kepulauan. Atas pengajuan permohonan di Maluku Utara Syahrir juga menerima sebanyak Rp 4,9 miliar.

Ketika menjabat di Riau, ia terima dari perusahaan sawit yakni; dari Satimin pengurusan tanah terlantar HGU PT Peputra Supra Jaya Rp 20 juta, Jusman Bahudin pendaftaran HGU PT Sekarbumi Alam Lestari sebanyak Rp 80 juta, Ahmad Fahmi Halim perpanjangan PT Eka Dura Indonesia sebanyak Rp 1 miliar, Indra Gunawan pengurusan HGU PT Safari Riau sebanyak Rp 10 juta dan Suhartono dalam pengurusan HGU First Resource Grup antara lain PT Riau Agung Karya Abadi, PT Perdana Inti Sawit Perkasa, PT Surya Intisari Raya, PT Meridan Sejati Surya Plantation sebanyak Rp 15 juta.

Semasa Syahrir di Riau permohonan HGU yang sudah selesai yakni PT Agritama Palma Lestari, PT Adei Plantation & Industry, PT Dian Anggara Persada, PT Riau Anugerah Sentosa, PT Graha Permata Hijau, PT Nusantara 5, PT Riau Agung Karya Abadi, PT Inecda, PT Peputra Masterindo dan PT Safari Riau.

Untuk permohonan yang diteruskan ke Kementerian ATR/BPN yakni PT Sewangi Sejati Luhur, PT Pulau Kundur Perkasa, PT Perdana Intisawit Persada, PT Eka Dura Indonesia, PT Surya Palma Sejahtera, PT Surya Intisari Raya, PT Sumber Jaya Indahnusa Coy, PT Meridan Sejati Surya Plantation.

Selama pengurusan berlangsung ia juga menerima sebanyak Rp 8,2 miliar yang ditempatkan direkening keponakan, pembantu dan adik ipar.

Anak buah Syahrir juga menerima uang dari perusahaan seperti yang diakui oleh Risna Virgiyanti yang menerima uang Rp 14 juta dari Sudarso General Manajer PT Adimulia Agrolestari. Sutrilwan juga menerima dari Sudarso Rp 75 juta untuk perbaikan gedung Kantah Kampar. Suhartono juga akui sering biayai sewa mobil kala Syahrir pulang kampung ke Palembang, serta membelikan peralatan kantor pertanahan Dumai dan Kanwil Riau. Yang rutin menerima hewan kurban dan berikan barang saat peringatan Hari Tata Ruang.

Modus Korupsi Syahrir

Jabatan Syahrir sebagai pemberi izin pembedaan dan pembaruan HGU dari 25 hingga 250 hektar serta pemberian rekomendasi jika pengajuan lebih dari 250 hektar untuk diserahkan ke BPN Pusat. Ia juga berhak untuk menyelesaikan masalah pertanahan dilapangan seperti konflik dengan masyarakat, pembukaan blokiran HGU dan pembinaan PPAT, kerjasama dengan bank dan lain sebagainya. Maka atas kewenangan itulah Syahrir itulah membuat

perusahaan, PPAT, pegawai bank, pegawai petanahan menuruti permintaannya.

Untuk perusahaan biasanya menasar pada HGU yang akan berakhir kurang dari lima tahun, mempunyai konflik dengan masyarakat, pembukaan blokir HGU dan perubahan batas wilayah.

Jikalau masalah seperti ini terjadi, maka perusahaan akan berusaha jumpa dengan Syahrir lewat ajudannya Muhamad Teguh, supaya dimudahkan dalam perpanjangan HGU. Ini terjadi pada PT Adimulia yang lakukan pengurusan perpanjangan HGU sejak 2017 tapi hingga 2021 belum ada perkembangan padahal HGU akan kadaluarsa 2024. Padahal perusahaan belum mempunyai kebun plasma.

Jika terjadi konflik biasanya Syahrir akan jadi fasilitator penyelesaian, ini terjadi pada PT Eka Dura Indonesia. Jika terjadi blokir HGU dan perubahan batas wilayah seperti PT Sumber Jaya Indahnusa Coy, hanya dengan persetujuan Kanwil untuk melakukan verifikasi ulang data.

Untuk menerima uang dari perusahaan pengaju permohonan, Syahrir dan bawahannya beralasan perbuatan mereka diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agraria dan tata ruang /badan pertanahan nasional. Untuk bisa meminta “biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan ke wajib bayar” bunyi Pasal 21 ayat 2. Uang masuk dalam rekening pribadi tanpa pernah dibuat pertanggungjawaban apapun.

Hal lainnya, Syahrir juga memanfaatkan jabatannya sebagai Pembina pejabat pembuat akta tanah sesuai PermenATR/BPN nomor 17 tahun 2020 dengan tidak membayar imbal jasa yang sudah dilakukan. Padahal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 tahun 2021 tentang uang jasa pembuatan akta tanah, terkait imbal jasa maksimal 1 persen dari nilai transaksi. Pun begitu Syahrir tidak jujur cantumkan nilai transaksi.

Pun begitu, PPAT seperti Siska Indriyani menghubungi Syahrir untuk dimudahkan urusannya yang sudah berlarut-larut di Kantah Kampar.

Pencucian Uang

Uang gratifikasi yang diterima Syahrir sebanyak Rp 21, 1 miliar dan uang suap dari PT Adimulia Agrolestari sebanyak SGD 112.00. Uang tersebut

disembunyikan dan samarkan asal usul harta kekeayaan dengan melakukan penukaran mata uang asing ke rupiah, menitipkan uang di rekening keponakan dan adik ipar dengan modus setor tunai dan dikirim dari orang suruhan Syahrir, dipakai untuk membeli 9 bidang tanah. Penerimaan uang dari anak buah Syahrir di Maluku Utara dan Riau ditempatkan di rekening Eva Rusnati serta Syahrir sendiri .

Membeli mobil ; Brio atas nama Muhammad Isa, Alphard atas nama Syahrir, Toyota 86 atas nama Agasi Arliansyah, Isuzu MU-X atas nama Megawati. Dan motor PCX atas nama M Syahrir. sertifikat No 509 tanah di Karya Baru Palembang seluas 758 M2; sertifikat nomor 8588 di Sukamaju Palembang seluas 588 m2, sertifikat no 1190 di Terukis Rahayu, OKU Timur seluas 799 m2; sertifikat nomor 7648 Bukit Sangkal Palembang seluas 343 m2; HGB nomor 335 seluas 148 m2 di Sialang Palembang; sertifikat nomor 014226 di Terukis Rahayu OKU seluas 810 m2; uang Rp 100 juta; SGD 100.000; uang Rp 246 juta di BNI, Rp 157 juta di mandiri, Rp 315 juta di Panin Bank, Rp 202 juta di BNI yang sudah disita direkening penampung KPK.

Serta tanah atas nama Herman nomor 468, seluas 599 m2; tanah a.n Yuli Sasmita nomor 920 seluas 130 m2, nomor 01426, nomor 03 a.n Agasi Arliansyah; bangunan HGB a.n Mustar nomor 335.

Nilai kekayaan syahrir menyimpang dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri, sebab sejak 2017 hingga 2021 saja, jumlah gaji, tunjangan dan sumber lainnya hanya berkisar Rp 1,9 Miliar.

Makelar Tanah

Ketika pemeriksaan Syahrir sebagai terdakwa ia katakan selama aktif sebagai aparatur sipil negara bidang pertanahan di Sumatera Selatan ia sering membantu perusahaan dan perorangan yang ingin mencari tanah perkebunan. Dan sebagai penghubung dengan antara penjual dan pembeli tanah. Ini dilakukannya saat hari libur kerja, dari situlah ia banyak mendapatkan uang sebagai sukses *fee*. Wajar saja ini dilakukan sebab urusan pertanahan ia punya informasi yang lengkap.

Padahal sebagai penyelenggara negara dan pejabat yang wajib menjaga integritas dan membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), nyatanya gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan. Dan uang tersebut dipecah untuk ditempatkan kepada keluarga.

Menghindari Pajak

Setiap penambahan kekayaannya Syahrir atas tanah, mobil dan bangunan tidak dibuat atas namanya melainkan nama lain yakni anak, istri, menantu

maupun keluarga lain. ini usaha Syahrir untuk menghindar dikenakan pajak progresif. Serta usahanya untuk menyulitkan pemeriksaan dan pengawasan dari aparat penegak hukum.

Temuan lainnya

Hakim sering membatasi hak menggali dan penyampaian pertanyaan terhadap penuntut umum dan penasihat hukum, dengan alasan sidang harus cepat, ruang sidang akan digunakan pihak lain dan sidang lain sedang antri. Lalu menyuruh mendetailkan hal tersebut pada tuntutan dan pembelaan. Cara ini membuat sidang terburu-buru dan substansi pemeriksaan jadi lompat-lompat serta tidak tergali dengan baik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Muhammad Syahrir terbukti melanggar Dakwaan Kumulatif Kesatu pertama, Kedua dan Ketiga sebab sebagai pejabat penerbit izin ia memiliki produk keputusan yang penting dalam legalitas sebuah usaha perkebunan dan hak atas tanah. Maka Senarai merekomendasikan kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menghukum Syahrir dengan penjara selama 20 tahun serta merampas semua aset yang dikuasai dirinya hingga keluarga.
2. Hakim perintahkan jaksa untuk tetapkan tersangka perusahaan pemberi uang terhadap Syahrir, Keluarga dan para anak buahnya.
3. Kementerian ATR/BPN harus komitmen dalam pemberantasan mafia perizinan. Dan evaluasi dan cek ulang HGU yang selesai dan sedang berproses BPN Pusat, sebab diduga korupsi perizinan terjadi sejak dari Kantor Pertanahan hingga Kantor Wilayah BPN provinsi.